

**KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN  
PENGADILAN ADAT DALAM PERADILAN  
UMUM DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Hukum**



**Samparisna Elwindri Mirando Kbarek**

**NIM : 322015007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
2018**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samparisna E M Kbarek, SH  
NIM : 322015007 Email : Elwindry@yahoo.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia  
Pembimbing : 1. Dr. Titon Slamet Kurnia,SH.,MH  
2. Dr. Umbu Rauta,SH.,M.Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 18 September 2019

Meterai Rp. 6.000  
Samparisna E M K  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samparisna E M Kbarek, SH  
NIM : 322015007 Email : Elwindry@yahoo.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja, Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 18 September 2018

Samparisna E M Kbarek, SH

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

1956

Mengetahui,

Dr. Titon Slamet Kurnia, SH., MH

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Dr. Umu Ratta, SH., M. Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

## **Lembar Persetujuan**

### **Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan**

### **Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia**

#### **TESIS**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Hukum

**Samparisna Elwindri Mirando Kbarek**

**NIM : 322015007**

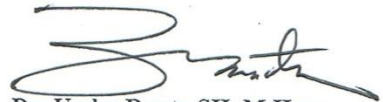
Telah disetujui untuk diuji pada tanggal 5 Juni 2018

**Pembimbing I**



**Dr. Titon Slamet Kurnia,SH.,MH**

**Pembimbing II**



**Dr. Umbu Rauta,SH.,M.Hum**

Lembar Pengesahan

Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam

Peradilan Umum Di Indonesia

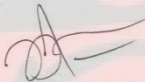
Samparisna Elwindri Mirando Kbarek

NIM : 322015007

Program Studi Magister Ilmu Hukum

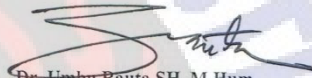
Mengetahui,

Penguji I



Dr. Titon Slamet Kurnia,SH.,MH

Penguji II



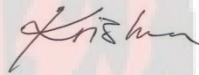
Dr. Umbu Rauta,SH.,M.Hum

Penguji III



Tvas Tri Arsoyo,SH.,M.Hum

Penguji IV



Dr. Krishna Diava Darumurti,SH.,MH

Diuji pada tanggal 5 Juni 2018

Diketahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Pri Budiyo,SH.,MH



## Lembar Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samparisna Elwindri Mirando Kbarek

NIM : 322015007

Judul Tesis : Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat  
Dalam Peradilan Umum Di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam menulis Tesis yang berjudul: **“Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia”**, tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia dicabut hak saya sebagai lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW atau dicabut gelar yang telah diberikan serta akibat hukum lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Salatiga, 5 Juni 2018

  
Samparisna Elwindri Mirando Kbarek



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaanNya sehingga penyusunan tesis dengan judul **“Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Selesaiannya penyusunan tesis ini dengan baik, tidak semata-mata karena kemampuan Penulis, akan tetapi berkat peran banyak pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan tertinggi Penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Papa Jan Dantje Kbarek, SE., MM, Mama Dra. Ruline Lientje Latumaerissa, Kaka dr. Rulland Oridek Valentino Kbarek, Adik Alienda Beatrix Elisabeth Kbarek, Adik Omega Peggy Insoraki Kbarek, Adik Imanuela Christin Natalia kbarek, Adik Alfandro Marcolino Korwa/Kbarek dan anak tersayang Angelicka Melanesia Hendrina Kbarek/Bonsapia, yang selalu memberikan dukung doa dan motivasi tanpa hentinya bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Arie Siswanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
3. Bapak Dr. Tri Budiyo, SH., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Titon Slamet Kurnia,SH.,MH dan Bapak Dr. Uumbu Rauta, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar, teliti dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan ini.

5. Bapak Tyas Tri Arsoyo,SH.,M.Hum dan Bapak Dr. Krishna Djaya Darumurti,SH.,MH selaku Penguji I dan Penguji II yang telah membantu mengarahkan dan menguji kelayakan tesis ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum maupun program studi Magister ilmu hukum yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada Penulis dalam perkuliahan maupun dalam diskusi-diskusi dalam pengembangan ilmu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum, khususnya program studi Magister Ilmu Hukum, juga kepada Bapak/Ibu Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang juga telah banyak membantu Penulis selama perkuliahan.
7. Teman-teman MIH angkatan 2015 (semester I); Stefan E Kamuntuan, SH, M.H, Ida Nuryatiningsih, SH, M.H, Dhea Prabanandi, SH, M.H, Joerdy Lekatompessi, SH, Yoseph I Mambrisau, SH, Vitri Lukmetiabl, SH, M.H, Muhammad Zaenul Bahtiyar, SH, M.H,. Terimakasih untuk motivasi dan semangat yang kalian berikan.
8. Squad Kontrakan Seruni 112 salatiga, Tante Serly Kbarek, Kaka Anthon Korwa, Kaka Yelson Sarapayari, Kaka Anelis Kbarek, Kaka Roberto Seba, Motivator tercinta Jily Gavrila Sompie, Minda Rosely, Adik-adik terkasih ; Susan Tewernusa, Yosua kbarek, Agus kbarek, Linda, Jeandri Sarapayari, Ruth Rosely, Alvionita Kapsian, Firjhon Papalangi, Amelia Yunus, Tato, Virgin Tewu, Dien, Ifandra Kakomol dan Yenricho Lakatua. Terimakasih untuk kebersamaan, doa dan motivasi yang kalian berikan tak henti-hentinya.
9. Kaka-kaka dan Adik-adik serta teman-teman HIMPAN Salatiga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena terlalu banyak dan hampir semua sangat dekat dengan penulis bahkan penulis sudah



anggap sebagai saudara selama studi di Salatiga. Terimakasih atas persaudaraan yang sudah kita bangun selama ini, harapan penulis suatu saat nanti kita akan membangun Papua bersama-sama.

Salatiga, 5 Juni 2018

**Penulis**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan tesis dengan judul **“Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia”** Terdiri dari :  
Bab I. Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan eksistensi Pengadilan Adat sebagai salah satu lingkungan kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia. Bab II. Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, bab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia. Bab III. Arti Penting Pengadilan Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat, Bab ini menjelaskan tentang arti penting Pengadilan Adat bagi masyarakat hukum adat, Dan Bab IV. Konstruksi Konstitusional Pengadilan Adat Di Bawah Mahkamah Agung. Bab ini mau menjelaskan bagaimana konstruksi Pengadilan Adat di bawah Mahkamah Agung dengan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Serta Bab V. Penutup Bab ini berisi pernyataan tentang kesimpulan (jawaban atas permasalahan) dan saran.

Salatiga, 5 Juni 2018

**Samparisna Elwindri Mirando Kbarek**

## Abstraksi

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk mereka yang hidup sebagai dan di dalam anggota masyarakat hukum adat, mengandung arti bahwa negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya sebagaimana juga dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia IV dimana kewajiban negara ini adalah merupakan hak warga negara.

Menjawab persoalan di atas maka Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Terkait dengan itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang eksistensi Pengadilan Adat di Indonesia secara konsitusional. Persoalan yang muncul terkait dengan eksistensi ini adalah pengakuan negara terhadap Pengadilan Adat dan hubungannya dengan pengadilan negara, dalam hal ini Pengadilan Adat didorong berada pada lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung. Dengan menggunakan Pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 8 Undang-Undang No. Tentang Peradilan Umum maka Pengadilan adat memiliki peluang didorong untuk menjadi pengadilan khusus berada dibawah Pengadilan Umum.

**Kata Kunci** : Hak Masyarakat Hukum Adat, Pengadilan Adat, Kekuasaan Kehakiman

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan Originalitas.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
1. Konsep Hukum Hak Asasi Manusia .....	11
2. Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia .....	19

F. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Yang Digunakan .....	25
3. Tehnik Pengumpulan Data .....	27
4. Unit Amatan dan Analisis .....	29
Bab II Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	29
A. Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Instrumen HAM Internasional.....	29
1. Konvensi ILO 107 .....	29
2. Konvensi ILO 169 .....	33
B. Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Indonesia .....	36
1. Pengakuan Masyarakat Adat Pra Kemerdekaan.....	36
2. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dari Pasca Kemerdekaan s/d Masa Reformasi.....	48
3. Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Hukum Adat .....	52

Bab III Arti Penting Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat.....	65
A. Perbedaan Peradilan dan Pengadilan.....	65
B. Eksistensi Pengadilan Adat di Indonesia.....	70
1. Sejarah Pengakuan Pengadilan Adat.....	70
2. Peran Pengadilan Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat.....	86
Bab IV Konstruksi Konstitusional Pengadilan Adat Di Bawah Mahkamah Agung.....	100
A. Sejarah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	100
1. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUD NRI Tahun 1945 Pertama (18 Agustus 1945-27 Desember 1949).....	100
2. Kekuasaan Kehakiman pada Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950).....	104
3. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).....	109
4. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUD NRI Tahun 1945 Ke Dua (5 Juli 1959-Sekarang).....	112



B. Pengakuan Internasional Pengadilan Adat dan Pengadilan di Bawah Mahkamah Agung.....	118
C. Hubungan Antara Pengadilan Adat dan Pengadilan di Bawah Mahkamah Agung.....	121
D. Konstruksi Konstitusional Terhadap Eksistensi Pengadilan Adat.....	135
1. Mendudukan Pengadilan Adat ke Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia.....	135
2. Yuridiksi Pengadilan Adat.....	159
Bab V Penutup.....	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	175
Daftar Pustaka.....	177